

**METADATA STATISTIK  
KEGIATAN**

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Dokumen Hukum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Kegiatan		2023
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik		Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi		-
<b>I. PENYELENGGARA</b>		
1.1	Instansi Penyelenggara	Biro Hukum
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Telepon	-
	Faksimile	-
	<i>Email</i>	birohukum@babelprov.go.id
<b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>		
2.1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	Fery Afrianto
	Eselon 2	Harpin, SH
2.2	Penanggung Jawab Teknis	
	Nama	Andi Namandang, SH., MH.
	Jabatan	Koordinator Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
	Alamat	Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Telepon	(0717) 439325, (0717) 439326, (0717) 439327
	Faksimile	0717-439324
	<i>Email</i>	andi.namandang@babelprov.go.id
<b>III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN</b>		
3.1	Latar Belakang Kegiatan	Peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional, sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, diperlukan kompilasi data dokumen hukum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.2	Tujuan Kegiatan	Menyusun rekapitulasi data dokumen hukum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3	Rencana Jadwal Kegiatan	
	Perencanaan Kegiatan	2023-01-01 s.d. 2023-01-31
	Desain	2023-01-01 s.d. 2023-01-31
	Pengumpulan Data	2023-01-01 s.d. 2023-12-31
	Pengolahan Data	2023-01-01 s.d. 2023-12-31
	Analisis	2023-01-01 s.d. 2023-12-31
	Diseminasi Hasil	2023-01-01 s.d. 2023-12-31
	Evaluasi	2023-01-01 s.d. 2023-12-31

### 3.4 Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah peraturan daerah	Peraturan daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota	Periode pengumpulan data
Jumlah peraturan gubernur	Peraturan gubernur	Jumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah	Periode pengumpulan data
Jumlah Artikel Hukum yang telah di publikasikan	Artikel hukum	Jumlah artikel dengan topik hukum yang telah dipublikasikan	Periode pengumpulan data
Jumlah monografi hukum	Monografi hukum	Jumlah ringkasan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan	Periode pengumpulan data
Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan	Produk hukum daerah	Jumlah peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD	Periode pengumpulan data

#### IV. DESAIN KEGIATAN

4.1	Kegiatan ini dilakukan	BERULANG
4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	TAHUNAN

4.3	Tipe Pengumpulan Data	LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
4.5	Wilayah Kegiatan	
	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG
4.6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data sekunder
4.7	Sarana Pengumpulan Data	CAWI
4.8	Unit Pengumpulan Data	Individu
<b>V. DESAIN SAMPEL</b> (khusus survei)		
5.1	Jenis Rancangan Sampel	-
5.2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	-
5.3	Metode yang Digunakan	-
5.4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-
5.5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-
5.6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-
5.7	Unit Sampel	-
5.8	Unit Observasi	-
<b>VI. PENGUMPULAN DATA</b>		
6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya : pemeriksaan data
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	Staf instansi penyelenggara
6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma IV/S1/S2/S3
6.6	Jumlah Petugas	Supervisor/penyelia/pengawas: 1 Pengumpul data/enumerator: 35

6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	Editing, Coding, Data Entry, Validasi
7.2	Metode Analisis	DESKRIPTIF
7.3	Unit Analisis	Lainnya : OPD
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Provinsi
VIII. DISEMINASI HASIL		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak ( <i>hardcopy</i> )	Tidak
	Digital ( <i>softcopy</i> )	Ya
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak	-
	Digital	2024-01-02;
	Data Mikro	-

**METADATA STATISTIK  
VARIABEL**

<b>Nama Variabel</b>	<b>Alias</b>	<b>Konsep</b>	<b>Definisi</b>	<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>Referensi Waktu</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>Aturan Validasi</b>	<b>Kalimat Pertanyaan</b>	<b>Apakah variabel dapat diakses umum</b>
Jumlah peraturan daerah	Jumlah peraturan daerah	Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota	-	Periode pengumpulan data	Jumlah	Peraturan daerah	Integer	1. Peraturan Daerah	Tidak ada;	Tidak ada	Ya
Jumlah peraturan gubernur	Jumlah peraturan gubernur	Jumlah peraturan gubernur	Jumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah	-	Periode pengumpulan data	Jumlah	Peraturan	Integer	1. Peraturan Gubernur	Tidak ada;	Tidak ada	Ya
Jumlah monografi hukum	Jumlah monografi hukum	Monografi hukum	Jumlah ringkasan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan	-	Periode pengumpulan data	Jumlah	Monografi	Integer	1. Monografi hukum	Tidak ada;	Tidak ada	Ya
Jumlah artikel hukum yang telah dipublikasikan	Jumlah artikel hukum yang telah dipublikasikan	Artikel hukum	Jumlah artikel dengan topik hukum yang telah dipublikasikan	-	Periode pengumpulan data	Jumlah	Artikel	Integer	1. Artikel hukum	Tidak ada;	Tidak ada	Ya

**METADATA STATISTIK  
INDIKATOR**

<b>Nama Indikator</b>	<b>Konsep</b>	<b>Definisi</b>	<b>Interpretasi</b>	<b>Metode Perhitungan</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>Apakah Indikator Komposit</b>	<b>Indikator Pembangun</b>	<b>Variabel Pembangun</b>	<b>Level Estimasi</b>	<b>Apakah indikator dapat diakses umum</b>
Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan	Produk hukum	Jumlah peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD	Tidak ada	Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan (z) adalah penjumlahan dari peraturan daerah (x) dan peraturan gubernur (y)	Jumlah	Produk hukum	Wilayah	Tidak	-	Jumlah peraturan daerah Jumlah peraturan gubernur	Provinsi	Ya
Jumlah Dokumen Hukum	Dokumen Hukum	Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.	-	-	Total	dokumen	Wilayah Jenis Dokumen Hukum	Tidak	-	Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan Jumlah artikel hukum yang telah dipublikasikan Jumlah monografi hukum	Provinsi	Ya